

Implementasi Komponen 3 Program Pembangunan Berpusat pada Manusia (*People Centered Development Programme – PcDP tahap 2*)

“Pelebagaan Pembangunan Mata Pencarian yang Berkelanjutan untuk Masyarakat Adat Papua”

ILO – PcDP 2: Proyek Pelebagaan Pembangunan Mata Pencarian yang Berkelanjutan untuk Masyarakat Adat Papua
ILO dan UNDP ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat adat Papua melalui sistem dan proses berbasis pemerintah daerah dan masyarakat madani untuk mengembangkan mata pencarian secara berkelanjutan. Didanai Pemerintah Selandia Baru, proyek ini difokuskan pada pembangunan kapasitas para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat Papua pelaku usaha mikro di lima kabupaten percontohan: tiga di Provinsi Papua dan dua di Provinsi Papua Barat.

Pendekatan dari proyek ini adalah menyediakan model kerangka kerja yang mengimplementasikan proses yang tepat untuk mengidentifikasi dan mendesain intervensi dalam mengembangkan produk-produk kompetitif lokal dan usaha mikro yang dimiliki oleh masyarakat adat Papua. Mengawali proyek ini, UNDP dan BPMK bekerjasama dengan Universitas Cendrawasih serta Universitas Negeri Papua (UNIPA) telah melaksanakan kajian tentang produk unggulan, Kajian Pendapatan Rumah Tangga dan Pemetaan Pelaku Usaha Mikro Asli Papua (Baseline Survey) beserta kebutuhan dalam mengembangkan usahanya. Dari kegiatan pemetaan pelaku usaha mikro asli

Papua tersebut telah diidentifikasi 450 masyarakat adat Papua di Kabupaten Jayawijaya, Boven Digoel, Sarmi di Provinsi Papua serta Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-fak di Provinsi Papua Barat yang telah menjalankan usaha mikro atau kegiatan ekonomi produktif dengan memproduksi produk lokal seperti ubi Jalar, kelapa, sayuran, ternak ayam buras, dan pala.

Di akhir proyek diharapkan para pemangku kepentingan dapat menggunakan informasi sistematis dan relevan tentang situasi terkini pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK) asli Papua, pemetaan lembaga keuangan mikro, kajian komoditas terpilih dengan pendekatan rantai nilai dan Iklim Usaha, serta diagnosa ketenagakerjaan untuk menyediakan layanan pengembangan usaha bagi masyarakat, termasuk: **(i) Dukungan terhadap pengembangan usaha lokal di Papua dan Papua Barat; (ii) Fasilitasi atas akses ke layanan keuangan bagi pelaku usaha yang terseleksi; (iii) Pendirian Pusat Pengembangan Usaha Mikro (Business Development Services Provider /BDSP) atau Inisiatif Inkubasi Bisnis.** Proyek ini dimulai pada Juni 2013 di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dari delapan target wilayah, lima target wilayah terpilih sebagai kabupaten percontohan: Jayawijaya, Sarmi, Boven Digoel di Provinsi Papua serta Manokwari dan Fakfak di Provinsi Papua Barat

Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Asli Papua dan Akses ke Lembaga Keuangan Mikro

Untuk mengembangkan UMK asli Papua melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan tentang manajemen usaha, keuangan rumah tangga, akses ke lembaga keuangan mikro (LKM), dan pemasaran, PcDP 2 melalui Pusat Pelayanan Pengembangan Usaha (Business Development Services Provider/BDSP) di tingkat kabupaten telah melakukan serangkaian layanan pengembangan bisnis melalui pelatihan dan pendampingan pengembangan usaha yang berkualitas dan berkelanjutan untuk sejumlah 504 UMK asli Papua (65 persen perempuan pengusaha) yang memiliki kegiatan ekonomi produktif dengan memproduksi komoditi lokal di target wilayah Percontohan PcDP 2: distrik Bolakme-Jayawijaya, Pantai Timur-Sarmi dan Mandobo-Boven Digoel Manokwari Utara dan Minyambo-Manokwari, Fakfak Tengah serta Kokas-Fakfak yang juga termasuk program kerjasama dengan Bank Indonesia untuk anggota Koperasi Mama-mama Pedagang Asli Papua.

Pelatihan ini menggunakan modifikasi **modul ILO untuk Kewirausahaan Berbasis Gender (Gender Entrepreneurship Together/GETAhead)** dan **Modul Pendidikan Keuangan untuk Keluarga**.



Mama Adriana Howay - Alumni Pelatihan Kewirausahaan Berperspektif Gender (GETAhead) dan Pendidikan Keuangan untuk Keluarga (FE)

Hasil dukungan pengembangan usaha yang telah diberikan adalah sebagai berikut:



Pelatihan Kewirausahaan dan Pendidikan Keuangan untuk anggota Koperasi Mama-mama Pedagang Asli Papua kerjasama BI

- **Tersedianya pangkalan data 504 (65 persen perempuan) masyarakat adat Papua yang memiliki usaha mikro ataupun melakukan kegiatan ekonomi produktif dan telah terseleksi** untuk mendapatkan layanan pengembangan usaha berupa pelatihan dan pendampingan kewirausahaan, pengelolaan keuangan rumah tangga, konsultasi bisnis, fasilitasi akses ke lembaga keuangan mikro khususnya untuk menabung, akses pemasaran dan dua bulan pendampingan pasca pelatihan kewirausahaan oleh BDSP;
- **504 UMK asli Papua (65 persen perempuan pengusaha) mampu mengelola usaha dan menyusun rencana usaha bagi pengembangan usaha yang telah mereka jalankan;** dapat mengelola keuangan rumah tangga dan menyusun rencana anggaran, rencana tabungan, menyusun biaya dan menetapkan harga serta melakukan pencatatan usaha dan keuangan keluarga; dan
- **Tersedianya informasi kerjasama yang berisi komitmen pemerintah lima kabupaten, perbankan, dan lembaga lainnya untuk mengintegrasikan program pemberdayaan ekonomi** khususnya pelatihan produksi dan pasca produksi untuk penambahan nilai komoditi lokal kepada UMK asli Papua yang telah mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan Kewirausahaan oleh BDSP;
- **Bank Indonesia Perwakilan Papua dan Papua Barat melalui dana CSR memadukan kegiatan pelatihan teknis dan penyediaan sarana produksi** untuk penambahan nilai produk dengan target peserta UMK asli Papua yang juga alumni Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Gender dan Pendidikan Keuangan untuk Keluarga di Kabupaten Jayawijaya, Manokwari, dan Fakfak.

Pendirian Pusat Pelayanan Pengembangan Usaha (Business Development Services Provider/BDSP)

Untuk menjawab kebutuhan akan pentingnya mendirikan atau menguatkan lembaga lokal yang akuntabel serta mampu memberikan layanan pengembangan usaha mikro melalui pelatihan dan pendampingan yang berkualitas dan berkelanjutan terutama untuk masyarakat adat Papua, maka ILO - UNDP bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Bank Indonesia Wilayah Papua dan Papua Barat telah melaksanakan serangkaian penguatan kapasitas baik untuk sumber daya pelatih sekaligus pendamping kewirausahaan maupun penguatan kelembagaan kepada delapan institusi lokal di tingkat provinsi dan kabupaten guna dikembangkan menjadi Pusat Pelayanan Pengembangan Usaha (Business Development Services Provider/ BDSP).



Pelatihan untuk Pelatih sekaligus Pendamping Kewirausahaan Berperspektif Gender (GETAhead) dan Pendidikan Keuangan untuk Keluarga di tingkat Kabupaten dan Provinsi Papua dan Papua Barat

Hasil penguatan kapasitas dan penguatan kelembagaan untuk BDSP

- **Delapan institusi lokal yang terseleksi telah dikembangkan sebagai Pusat Pelayanan Pengembangan Usaha (BDSP)** dan mampu memberikan layanan pengembangan usaha dengan metodologi yang jelas, kurikulum, program pelatihan, pendampingan, dan mencapai target penerima manfaat melalui pelatihan manajemen bisnis, keuangan rumah tangga, pemasaran, akses ke pasar, penyelenggaraan pameran dagang, konsultasi bisnis dan intermediasi keuangan

yang pada akhirnya akan berfungsi sebagai pusat sumber daya dan inkubasi untuk usaha mikro dan kecil. jasa pelayanan pelatihan dan pendampingan dari BDSP ini menggunakan modifikasi modul ILO dari Kewirausahaan Berperspektif Gender (GET Ahead) dan Modul Pendidikan Keuangan untuk Keluarga.

- **Delapan BDSP di tingkat kabupaten maupun provinsi tersebut adalah sebagai berikut:**
 1. Yayasan Oikonomos Papua di Jayawijaya;
 2. Credit Union Sinar Papua Selatan di Boven Digoel;
 3. Yayasan Kemandirian Masyarakat Papua (IPI) di Sarmi;
 4. Yayasan Pengembangan Masyarakat dan Konservasi Sumber Daya Alam (PERDU) di Manokwari;
 5. Lembaga Gerakan Masyarakat Papua Lestari (GEMAPALA) di Fak-fak;
 6. Koperasi Mama-Mama Pedagang Asli Papua (KOMMPAP) di Jayapura;
 7. Lembaga Inkubator Bisnis (PSPJK) UNCEN – BDSP Fasilitator Tingkat Provinsi; dan
 8. Lembaga Inkubator Bisnis UNIPA-BDSP Fasilitator Tingkat Provinsi
- **Total 35 pelatih (43 persen perempuan) sekaligus pendamping kewirausahaan di tingkat kabupaten dan Provinsi telah mampu menyediakan layanan-layanan** pengembangan usaha dengan metodologi, kurikulum, dan program yang jelas, berkualitas dan berkelanjutan. Pelatih sekaligus pendamping di tingkat Provinsi dan Kabupaten tersebut berasal dari: BPMK&KK, Disperindagkop dan UMKM, Balai Penyuluh Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Balai Latihan Koperasi, Dinas Tenaga Kerja, Universitas Cendrawasih, Universitas Negeri Papua, KKMB, Koperasi Mama-mama Pedagang Asli Papua, Credit Union Sinar Papua Selatan, Yayasan Oikonomos Papua, Perdu, dan Gemapala;
- **Total 23 (43% perempuan) peneliti dari Lembaga Penelitian** Universitas Negeri Papua, Pusat Kajian Keuangan Daerah (Keuda) Universitas Cendrawasih, Fakultas Ekonomi Universitas Ottow Geissler dan Fasilitator Kabupaten (DPA) mendapatkan penguatan kapasitas melalui lokakarya induksi dan sharing knowledge Bina

Swadaya Konsultan tentang Lembaga Keuangan Mikro, Pengembangan UMKM, Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi;

- **Total 11 (36% perempuan) peserta (5 untuk fasilitator lokal rantai nilai, iklim usaha dan 6 fasilitator lokal diagnosa analisa ketenagakerjaan)** yang terdiri dari peneliti Lemlit UNIPA, Lembaga Inkubator Bisnis (PSPJK) UNCEN, Bappeda Provinsi Papua, Bappeda Provinsi Papua Barat telah mendapatkan pelatihan dari PDPM - ITS untuk fasilitator lokal tentang perencanaan bersama program ketenagakerjaan (*Employment Diagnostic Analysis*) dan dari Riwani Globe untuk enumerator lokal survey rantai nilai komoditas lokal dan iklim usaha;

Kajian-kajian sebagai Panduan Pembuatan Program dan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Lokal dan UMKM Asli Papua

Untuk menyediakan pemangku kepentingan dengan informasi yang sistematis dan relevan terkait dengan pengembangan ekonomi lokal, komoditi lokal, pengembangan UMK Asli Papua, dan ketenagakerjaan ILO-UNDP bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat telah melaksanakan kegiatan kajian dan pemetaan yang hasilnya dapat digunakan sebagai panduan dalam mengembangkan program dan kebijakan.

Kajian-kajian yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1-10 Pemetaan Lembaga Keuangan Mikro dan Kajian Situasi Terkini Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil di tingkat kabupaten: delapan kabupaten (Jayawijaya, Yahukimo, Sarmi, Yappen, Boven Digoel, Mimika, Manokwari, Fakfak) dan di dua Provinsi: Papua dan Papua Barat;
11. Kajian Ubi Jalar dengan Pendekatan Rantai Nilai dan Iklim Usaha di Kabupaten Jayawijaya;
12. Kajian Ayam Buras dengan Pendekatan Rantai Nilai dan Iklim Usaha di Kabupaten Boven Digoel;

13. Kajian Kelapa dengan Pendekatan Rantai Nilai dan Iklim Usaha di Kabupaten Sarmi;
14. Kajian Sayuran dengan Pendekatan Rantai Nilai dan Iklim Usaha di Kabupaten Manokwari;
15. Kajian Pala dengan Pendekatan Rantai Nilai dan Iklim Usaha di Kabupaten Fakfak;

Hasil penelitian rantai nilai dan iklim usaha untuk komoditi terpilih yang diproduksi oleh masyarakat adat Papua ini dapat memberikan wawasan

bagaimana mensinergikan kegiatan ekonomi yang ada dengan membangun industri dan pasar dapat berdampak dan mampu meningkatkan pembangunan pedesaan, terutama mereka yang telah memulai usaha mikro dan memiliki potensi dapat semakin dikembangkan.

16. Analisa Diagnostik Ketenagakerjaan di Provinsi Papua; dan
17. Analisa Diagnostik Ketenagakerjaan di Provinsi Papua Barat.



Salah satu kelompok diskusi dalam Lokakarya Lintas Sektoral Pemetaan Lembaga Keuangan Mikro dan Situasi Terkini Pengembangan UMK di tingkat Provinsi Papua Barat

ILO Papua dan Papua Barat

Gedung BKPM Provinsi Papua Lantai 2
Jl. Sam Ratulangi No. 32 | Jayapura 99112
Ph: 0697-521149 | Fax: 0967-522146
Email: sinthia@ilo.org; rina@ilo.org

Kantor ILO Jakarta

Menara Thamrin Lantai 22
Jl. M.H. Thamrin Kav. 3 | Jakarta 10250 - INDONESIA
T.: +62 21 3919112 | F.: +62 21 3100766
Email: jakarta@ilo.org | www.ilo.org/jakarta